

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
KECENDERUNGAN *FRAUD* PENGADAAN BARANG DI RUMAH SAKIT
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Pipin Cahyati

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
2018

ABSTRACT

The purpose of the study is to analyze the influence of factors on the goods procurement fraud tendency in hospitals that located in Special Region of Yogyakarta . This study used purposive sampling to determine the sample that will be used. Total questionnaires spread are 74. However only 68 questionnaires can be collected. Tthe data that used in this study is primary data from questionnaires. The method that used in this study is multiple linear regression of analysis with SPSS 17.0. The results of this study indicate that Procedural Justice, Rule Enforcement, The Effectiveness of Internal Control and Information Asymmetry have a positive effect on The Tendency of Goods Procurement Fraud. However, Distributive Justice, Organizational Ethical Culture and Organizational Commitment have a negative effect on The Tendency of Goods Procurement Fraud.

Keywords: Fraud, Fraud Triangle, Goods Procurement.

PENDAHULUAN

Hasil pemantauan ICW tahun 2010-2016 menyatakan Dana Alat Kesehatan merupakan objek korupsi tertinggi. Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kasus korupsi kesehatan antara lain pengelolaan anggaran kesehatan kurang baik, rendahnya transparansi dokumen pengadaan, adanya pelanggaran peraturan perundang-undangan mengenai prosedur pengadaan. Selain itu, keterlibatan pejabat eselon 1 hingga eselon 4 dalam kasus korupsi menunjukkan bahwa integritas pejabat publik masih rendah (ICW, 18 April 2017). Kecurangan (*fraud*) adalah modus yang dilakukan oleh pihak yang memiliki keinginan mendapatkan keuntungan secara instan dengan mengambil hak pihak lain untuk kepentingan individu atau kelompok.

Kasus kecurangan juga terjadi pada sektor yang menangani pelayanan umum kepada masyarakat yaitu rumah sakit. Rumah sakit merupakan salah satu institusi

pelayanan publik yang berperan penting dalam peningkatan derajat kesehatan masyarakat dan diharapkan untuk dapat melayani masyarakat, dapat berkembang dan mandiri serta memberikan pelayanan yang bermutu dan terjangkau bagi masyarakat. Kinerja yang baik dapat terwujud apabila rumah sakit dikelola dengan cara transparan, adanya kemandirian, akuntabel, adanya pertanggungjawaban dan kewajaran. Namun harapan tersebut belum sepenuhnya dirasakan karena kurangnya instrumen organisasi yang memadai guna menciptakan sistem kelola yang baik dan kurangnya komitmen dari para pengelola rumah sakit. Sehingga timbul beberapa kasus kecurangan seperti penyimpangan, penyelewengan, penyelundupan dan korupsi.

Terdapat teori yang menjelaskan terjadinya kecurangan karena tiga hal yang disebut model segitiga kecurangan (*The Fraud Triangle*) yang dikemukakan oleh Donald R. Cressey. Teori *fraud triangle* inilah yang digunakan dalam penentuan variabel pada penelitian ini melalui unsur-unsur *fraud triangle* yang terdiri dari tekanan (*pressure*), kesempatan (*opportunity*) dan rasionalisasi (*rationalization*).

Tekanan merupakan kondisi yang mendorong individu untuk melakukan kecurangan karena beberapa tuntutan yang dialaminya seperti masalah keuangan, ketidakpuasan kerja, gaya hidup dan keserakahan. Lingkungan tempat kerja dapat mempengaruhi tekanan yang dialami individu. Faktor lingkungan yang menjadi penyebab timbulnya tekanan adalah masalah keadilan organisasi di perusahaan. Keadilan organisasi terdiri dari keadilan distributif dan keadilan prosedural. Dalam penelitian ini tekanan diproksikan oleh variabel keadilan distributif dan keadilan prosedural.

Kesempatan adalah peluang yang membuat seseorang dapat melakukan kecurangan secara leluasa yang disebabkan oleh ketidakdisiplinan karena kurangnya penegakan peraturan, pengendalian internal yang lemah, kelemahan dalam mengakses informasi. Dalam penelitian ini kesempatan diproksikan oleh variabel penegakan peraturan, keefektifan pengendalian internal dan asimetri informasi. Dalam penelitian ini kesempatan diproksikan oleh variabel penegakan peraturan, keefektifan pengendalian internal dan asimetri informasi.

Rasionalisasi yaitu sikap yang ditunjukkan oleh seseorang dengan melakukan pembenaran atas tindakan yang dilakukan dan dapat juga menimbulkan sikap serakah. Faktor-faktor yang dijadikan pembenaran sehingga seseorang melakukan kecurangan

yaitu budaya etis organisasi dan komitmen organisasi. Lestari, dkk (2015) menjelaskan bahwa budaya etis organisasi adalah keyakinan dan tingkah laku yang menjadi panutan bagi semua anggota organisasi karena dianggap benar dan sesuai dengan moral. Komitmen organisasi yaitu sikap dan rasa kesetiaan karyawan terhadap organisasi tempat bekerja sehingga mendorong karyawan untuk melakukan pekerjaan dengan sebaik mungkin tanpa berniat merugikan organisasi. Dalam penelitian ini rasionalisasi diprosikan oleh variabel budaya etis organisasi dan komitmen organisasi.

Penelitian ini adalah pengembangan dari penelitian yang dilakukan Mustikasari (2013), Najahningrum (2013), Adinda dan Ikhsan (2015) serta Chandra dan Ikhsan (2015). Berbeda dengan penelitian sebelumnya, peneliti mengubah objek penelitian yaitu rumah sakit karena ingin memberikan informasi kepada pembaca bahwa kasus kecurangan kemungkinan dapat juga terjadi pada sektor pelayanan publik seperti rumah sakit. Di Daerah Istimewa Yogyakarta terdapat banyak rumah sakit akreditasi paripurna yang seharusnya memiliki pengelolaan yang baik dan integritas pejabat publik yang tinggi. Namun faktanya ditemukan fenomena kecurangan yang pernah terjadi di beberapa rumah sakit besar tersebut.

RERANGKA TEORI DAN PENURUNAN HIPOTESIS

Theory of Planned Behavior

Theory of planned behavior (TPB) dikemukakan oleh Icek Ajzen tahun 1985. Ajzen (1991) dalam Urumsah, dkk (2016) mendefinisikan TPB sebagai teori yang menjelaskan faktor-faktor individu dalam berperilaku. Teori ini mendeskripsikan bahwa sebelum manusia berperilaku ada faktor-faktor yang mempengaruhi sehingga memunculkan niat (*intention*) dan akhirnya menjadi perilaku (*behavior*).

Fraud Triangle Theory

Fraud triangle theory dikemukakan oleh Donald R. Cressey. Cressey (1953) dalam Mustikasari (2013) membagi 3 kondisi yang menjadi penyebab seseorang melakukan tindakan kecurangan yaitu tekanan (*pressure*), kesempatan (*opportunity*) dan rasionalisasi (*rationalization*).

Terdapat faktor-faktor yang menyebabkan kecenderungan *fraud* pengadaan barang dapat terjadi. Pengaruh beberapa faktor terhadap kecenderungan *fraud* pengadaan barang dapat dilihat pada bagian berikut.

1. Pengaruh Keadilan Distributif terhadap Kecenderungan *Fraud* Pengadaan Barang

Najahningrum (2013) menyatakan bahwa keadilan distributif merupakan kesesuaian gaji atau kompensasi lain yang diterima oleh karyawan atas usahanya dalam pekerjaan yang dilakukan untuk organisasi. Apabila pegawai merasa mendapat imbalan yang layak atas pekerjaannya maka mendorong pegawai tersebut untuk melaksanakan proses kegiatan pengadaan barang dengan cara yang baik dan sesuai dengan ketentuan pada perjanjian/kontrak. Sebaliknya, apabila pegawai merasa imbalan yang diterima kurang layak atas usahanya dalam pekerjaan maka muncul perasaan tidak puas akan hasil yang diterimanya. Hal tersebut mendorong pegawai untuk melakukan berbagai cara agar mendapat keuntungan termasuk dengan melakukan kecurangan sehingga akan muncul ketidaksesuaian dan ketidakwajaran dalam proses pengadaan barang yang dapat merugikan semua pihak di perusahaan. Afsari (2016) mengemukakan bahwa pernyataan tersebut didukung oleh teori *fraud triangle* yaitu seorang pegawai yang merasa imbalan-imbalan yang diterima tidak sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan, maka akan menimbulkan adanya tekanan (*pressure*) bagi pegawai untuk melakukan tindak kecurangan. Berdasarkan uraian diatas, maka diajukan hipotesis:

H₁: Keadilan distributif berpengaruh negatif terhadap kecenderungan *fraud* pengadaan barang.

2. Pengaruh Keadilan Prosedural terhadap Kecenderungan *Fraud* Pengadaan Barang

Pristiyanti (2012) menyatakan bahwa keadilan prosedural adalah persepsi pegawai mengenai keadilan berdasarkan prosedur yang digunakan pihak manajemen untuk menentukan alokasi penggajian di dalam instansi pemerintahan. Thibaut & Walker (1978) dalam Kadaruddin, dkk (2012) menjelaskan keadilan prosedural sebagai kesetaraan prosedur, artinya keadilan yang terjadi apabila seseorang melaksanakan perbuatannya sesuai dengan tata cara yang diharapkan. Prosedur dinilai adil apabila diimplementasikan secara konsisten, tidak ada kepentingan pribadi, informasi yang akurat, ada upaya untuk memperbaiki keputusan, kepentingan semua pihak dapat diwakili dan berdasarkan standar etika. Pernyataan ini didukung oleh teori *fraud triangle* bahwa ketika pegawai menganggap adanya ketidakadilan dalam prosedur pemberian gaji atau kompensasi lainnya, maka muncul tekanan dalam dirinya. Pegawai

akan merasa tidak puas sehingga terdorong untuk melakukan berbagai tindakan karena merasa tertekan termasuk dengan melakukan tindakan kecurangan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi keadilan prosedural pada suatu organisasi maka akan semakin rendah terjadinya tindak kecurangan. Berdasarkan uraian diatas, maka diajukan hipotesis:

H₂: Keadilan prosedural berpengaruh negatif terhadap kecenderungan *fraud* pengadaan barang.

3. Pengaruh Penegakan Peraturan terhadap Kecenderungan *Fraud* Pengadaan Barang

Afsari (2016) menjelaskan bahwa penegakan peraturan dimaksudkan sebagai pedoman bagi seseorang dalam melakukan tindakan ataupun sebagai alat pengendali dalam bertindak. Jika seseorang memiliki tingkatan moral yang tinggi, maka individu tersebut dapat memahami dan melaksanakan peraturan yang berlaku di dalam kehidupannya seperti peraturan di dalam masyarakat maupun peraturan di dalam tempat kerja. Ketentuan pengadaan barang di suatu perusahaan tentunya sudah ditetapkan secara tertulis dalam suatu perjanjian/kontrak dan sepantasnya harus ditaati. Apabila penegakan peraturan di perusahaan kurang baik maka tindakan-tindakan penyimpangan dapat terjadi. Pegawai akan mencari kesempatan untuk mencari keuntungan dengan cara yang salah sehingga proses pengadaan barang menjadi tidak sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati sehingga menyebabkan kerugian bagi perusahaan. Pernyataan tersebut didukung oleh teori *fraud triangle* bahwa seseorang memiliki kecenderungan untuk melakukan tindak kecurangan salah satunya dapat disebabkan karena faktor lingkungan. Apabila penegakan peraturan di suatu perusahaan tinggi maka lingkungan tersebut dapat dinilai baik, sehingga hal tersebut mampu mendorong individu dalam memahami serta melaksanakan peraturan yang berlaku. Sebaliknya apabila penegakan peraturan di suatu perusahaan rendah maka lingkungan tersebut dapat dinilai kurang baik, sehingga individu lebih memiliki banyak kesempatan untuk melakukan tindak kecurangan. Berdasarkan uraian diatas, maka diajukan hipotesis:

H₃: Penegakan Peraturan berpengaruh negatif terhadap kecenderungan *fraud* pengadaan barang.

4. Pengaruh Keefektifan Pengendalian Internal terhadap Kecenderungan *Fraud* Pengadaan Barang

Afsari (2016) berpendapat bahwa semakin tinggi pengendalian internal suatu pemerintahan maka dapat meminimalisir kecenderungan kecurangan akuntansi. Dalam aktivitas pengadaan barang dari proses perencanaan hingga selesai harus menggunakan sistem pengendalian internal yang baik sehingga dapat menghindarkan tindakan-tindakan yang dapat merugikan perusahaan seperti melakukan kecurangan pengadaan barang. Sedangkan apabila suatu perusahaan tidak memiliki pengendalian internal yang memadai maka tidak ada pengawasan dan otorisasi terhadap aktivitas pengadaan barang yang dilakukan sehingga membuka kesempatan bagi pegawai untuk berbuat curang demi kepentingan pribadi. Hal ini sesuai dengan teori *fraud triangle* yang menjelaskan bahwa salah satu faktor yang dapat meningkatkan kesempatan individu untuk melakukan kecurangan adalah sistem pengendalian internal yang rendah dan kurang efektif. Berdasarkan uraian diatas, maka diajukan hipotesis:

H₄: Keefektifan pengendalian internal berpengaruh negatif terhadap kecenderungan *fraud* pengadaan barang.

5. Pengaruh Asimetri Informasi terhadap Kecenderungan *Fraud* Pengadaan Barang

Najahningrum (2013) berpendapat bahwa jika terdapat kesenjangan informasi antara pihak prinsipal dan agen, maka dapat membuka kesempatan bagi pihak agen untuk melakukan kecurangan. Asimetri informasi menyebabkan pihak pengelola dana dapat memanipulasi laporan keuangan, misalnya memperbaiki kompensasi dan reputasinya, serta rasio-rasio keuangan. Jika pengelola informasi lebih banyak memahami tentang proses pencatatan, transaksi perusahaan, isi dan angka laporan keuangan pengadaan barang daripada pihak pengguna maka membuka peluang bagi pihak pengelola untuk melakukan korupsi pengadaan barang dengan sangat mudah karena mengetahui isi informasi yang sebenarnya. Hal itu sesuai dengan teori *fraud triangle* yang menjelaskan bahwa semakin tinggi tingkat kesenjangan informasi antara pihak pengelola dengan pengguna informasi maka semakin tinggi peluang untuk melakukan kecurangan. Berdasarkan uraian diatas, maka diajukan hipotesis:

H₅: Asimetri informasi berpengaruh positif terhadap kecenderungan *fraud* pengadaan barang.

6. Pengaruh Budaya Etis Organisasi terhadap Kecenderungan *Fraud* Pengadaan Barang

Afsari (2016) menyatakan bahwa budaya adalah nilai-nilai yang dianut dalam suatu organisasi. Sistem budaya yang baik akan menciptakan etika dan moral yang baik pula kepada setiap orang yang berada dalam organisasi. Apabila bagi suatu organisasi kecurangan merupakan hal yang wajar atau biasa terjadi setiap orang dalam organisasi tersebut akan cenderung melakukan kecurangan karena pegawai tersebut menganggap tindakan kecurangan sebagai tindakan yang rasional. Pernyataan tersebut didukung oleh teori *fraud triangle* bahwa pada kondisi organisasi yang kebanyakan pegawainya melakukan kecurangan dan tindakan itu dianggap wajar, pegawai yang lain juga akan melakukan kecurangan dikarenakan pembenaran akan tindakan tersebut sebagai sesuatu yang biasa terjadi dalam organisasi tersebut. Demikian juga sebaliknya, apabila dalam suatu organisasi telah ditanamkan nilai-nilai bahwa tindakan kecurangan adalah tindakan yang tidak patut dilakukan karena akan merugikan berbagai pihak, maka pegawai cenderung tidak akan melakukan kecurangan. Berdasarkan uraian diatas, maka diajukan hipotesis:

H₆: Budaya etis organisasi berpengaruh negatif terhadap kecenderungan *fraud* pengadaan barang.

7. Pengaruh Komitmen Organisasi terhadap Kecenderungan *Fraud* Pengadaan Barang

Najahningrum (2013) berpendapat bahwa komitmen organisasi adalah sikap kesetiaan individu terhadap organisasi tempat dia bekerja. Komitmen organisasi dibangun berdasarkan kepercayaan karyawan terhadap nilai-nilai organisasi, kerelaan membantu mewujudkan tujuan organisasi dan loyalitas untuk tetap menjadi anggota organisasi. Selanjutnya Afsari (2016) menjelaskan bahwa individu yang memiliki komitmen tinggi terhadap organisasi berarti telah memahami bahwa ketika bekerja, tujuannya adalah untuk kepentingan organisasi bukan kepentingan pribadi. Kecurangan merupakan penyimpangan yang dilakukan seorang individu untuk kepentingannya diri sendiri. Oleh karena itu, komitmen organisasi mempengaruhi kecenderungan kecurangan di dalam organisasi. Hal itu sesuai dengan teori *fraud triangle* yang menyatakan bahwa apabila seorang pegawai memiliki komitmen organisasi yang tinggi

maka akan mendorong pegawai tersebut memiliki sikap peduli kepada organisasi dan tidak akan melakukan tindakan yang dapat merugikan organisasinya. Sebaliknya, apabila pegawai tidak memiliki komitmen terhadap organisasinya maka kecenderungan tindakan yang merugikan organisasi dapat terjadi seperti melakukan kecurangan untuk kepentingan pribadi. Berdasarkan uraian diatas, maka diajukan hipotesis:

H₇: Komitmen organisasi berpengaruh negatif terhadap kecenderungan *fraud* pengadaan barang.

METODE PENELITIAN

Objek dan Subjek Penelitian

Rumah Sakit Pemerintah dan Swasta di Daerah Istimewa Yogyakarta. Subjek penelitian ini adalah pegawai bagian pengadaan barang, pegawai bagian akuntansi/keuangan dan apoteker yang terlibat dalam kegiatan pengadaan barang pada rumah sakit pemerintah dan swasta Daerah Istimewa Yogyakarta.

Jenis Data

Jenis data pada penelitian ini adalah data primer. Data diperoleh dengan penyebaran kuesioner kepada bagian pengadaan barang, bagian akuntansi/keuangan dan apoteker yang terlibat dalam pengadaan barang pada rumah sakit pemerintah dan swasta Daerah Istimewa Yogyakarta

Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*, dengan kriteria:

1. Rumah Sakit Pemerintah dan Swasta akreditasi paripurna (rating bintang lima) berdasarkan Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS) di Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Pejabat dan staf yang bertindak sebagai penanggungjawab dalam kegiatan pengadaan barang di rumah sakit Daerah Istimewa Yogyakarta.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode survei melalui kuesioner. Metode survei merupakan metode pengumpulan data primer yang menggunakan pertanyaan tertulis. Pengukuran dalam setiap variabel menggunakan skala likert (*likert scale*) dengan skor 1-5.

Uji Kualitas Data

Uji Validitas

Uji validitas ialah uji yang dilakukan dengan tujuan untuk menguji instrumen penelitian agar instrumen tersebut dapat memberikan hasil yang sesuai dengan tujuan penelitian. Fungsi lain dari uji ini ialah untuk mengukur apakah pernyataan dalam kuesioner benar-benar mengukur apa yang akan diukur. Uji validitas dalam penelitian ini menggunakan koefisien korelasi *pearson correlation*. Instrumen penelitian dapat dikatakan valid apabila r hitung (koefisien korelasi) > dari r tabel sebesar 0,2352 pada taraf signifikansi 5% atau 0,05.

Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas merupakan uji yang bertujuan untuk menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukur dapat dipercaya, serta untuk melihat derajat konsistensi atau stabilitas data yang diperoleh. Uji ini dilakukan dengan melihat konsistensi koefisien *Cronbach Alpha* untuk semua variabel. Pengukur variabel dapat dikatakan reliabel apabila nilai koefisien *Cronbach Alpha* lebih besar dari 0,6.

Uji Statistik Deskriptif

Pengujian statistik deskriptif digunakan untuk memaparkan dan menguraikan data menjadi sebuah informasi yang lebih jelas serta mudah dipahami. Pengujian statistik deskriptif digunakan untuk mengetahui nilai maksimum, minimum, rata – rata (*mean*) dan standar deviasi dari data penelitian.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji normalitas data digunakan untuk memastikan residual data apakah telah berdistribusi normal atau tidak. Residual data yang normal atau mendekati normal dapat menjadikan regresi dalam penelitian tersebut baik dan layak digunakan. Nazzaruddin dan Basuki (2015) menjelaskan bahwa uji normalitas yang digunakan dalam penelitian adalah uji *Kolmogorov Smirnov*, jika nilai $\text{sig} > 0,05$ maka residual data dikatakan berdistribusi normal.

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas digunakan untuk melihat hubungan independen yang satu dengan variabel independen yang lain. Data dinyatakan tidak terkena gejala multikolinearitas apabila nilai $\text{VIF} < 10$ atau nilai *tolerance* $> 0,1$.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk melihat apakah data bersifat heterogen atau homogen. Data yang baik memiliki sifat homogen, ketika data heterogen maka data terkena heteroskedastisitas. Pengujian heteroskedastisitas berupa Uji *Glejser*. Syarat agar data tidak terkena heteroskedastisitas adalah jika $\text{sig} > 0,05$ (alpha).

Uji Hipotesis dan Analisis Data

Uji hipotesis pada penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda guna menguji pengaruh beberapa variabel independen terhadap variabel dependen serta menguji pengaruh hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen.

Uji Nilai F

Nazzaruddin dan Basuki (2015) menyatakan bahwa uji nilai F digunakan untuk menguji apakah variabel independen secara simultan mampu memengaruhi variabel dependen dalam tabel ANOVA. Uji nilai F dilakukan dengan menggunakan kriteria sebagai berikut:

- a. Apabila $p\text{-value}$ (sig) $< \alpha$ (0,05), maka variabel independen secara keseluruhan berpengaruh terhadap variabel dependen.
- b. Apabila $p\text{-value}$ (sig) $> \alpha$ (0,05), maka variabel independen tidak berpengaruh secara keseluruhan terhadap variabel dependen.

Uji Nilai t

Nazzaruddin dan Basuki (2015) menjelaskan bahwa Uji nilai t digunakan untuk mengetahui tingkat pengaruh satu variabel independen secara individual terhadap variabel dependen. Pengujian ini dilakukan dengan cara membandingkan $\text{sig } t$ dengan α dengan tingkat signifikansi 5% atau 0,05. Kriteria untuk hipotesis diterima adalah sebagai berikut:

- a. Apabila nilai $p\text{-value}$ (sig) $< \alpha$ (0,05)
- b. Koefisien regresi searah dengan hipotesis

Uji Koefisien Determinan (*Adjusted R²*)

Nazzaruddin dan Basuki (2015) menjelaskan bahwa uji koefisien determinasi (*adjusted R²*) digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen. Nilai *adjusted R²* menjelaskan besarnya nilai koefisien determinasi harus diubah dalam bentuk presentase, setelah itu sisanya (100% -

presentase koefisien determinasi) dijelaskan oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam model.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Objek dan Subjek Penelitian

Berdasarkan metode *purposive sampling* dan survei rumah sakit yang dapat dilaksanakan penelitian ini diperoleh sampel sebanyak 7 rumah sakit yaitu 4 rumah sakit swasta dan 3 rumah sakit pemerintah di Daerah Istimewa Yogyakarta. Kriteria responden penelitian berupa pejabat dan staf yang bertindak sebagai penanggungjawab dalam kegiatan pengadaan barang di rumah sakit. Total kuesioner yang berhasil disebar yaitu sebanyak 74 kuesioner dan total kuesioner yang kembali sebanyak 74 kuesioner, jumlah kuesioner yang kembali dengan jawaban tidak lengkap sebanyak 4 kuesioner, jumlah kuesioner yang kembali namun tidak memenuhi kriteria responden sebanyak 2 kuesioner, sehingga data yang bisa diolah sebanyak 68 kuesioner atau 91,89% dari total jumlah kuesioner yang berhasil disebar. Berikut adalah analisis deskripsi variabel:

Tabel 4.3. Uji statistik Deskriptif

Variabel	N	Kisaran teoritis			Kisaran aktual			Std. Deviation
		<i>Min</i>	<i>Max</i>	<i>Mean</i>	<i>Min</i>	<i>Max</i>	<i>Mean</i>	
Kecenderungan <i>Fraud</i> Pengadaan Barang	68	9	45	27	11	26	18,53	2,980
Keadilan Distributif	68	4	20	12	12	18	15,43	1,519
Keadilan Prosedural	68	7	35	21	20	33	26,44	2,999
Penegakan Peraturan	68	5	25	15	15	25	20,09	2,177
Keefektifan Pengendalian Internal	68	5	25	15	15	24	19,91	1,937
Asimetri Informasi	68	6	30	18	15	26	20,63	2,715
Budaya Etis Organisasi	68	5	25	15	13	25	18,90	2,382
Komitmen Organisasi	68	8	40	24	23	35	28,44	2,530

Sumber: Output SPSS *versi 17*

Diolah kembali oleh Peneliti

Berdasarkan tabel 4.3 tersebut ditunjukkan bahwa variabel Kecenderungan *Fraud* Pengadaan Barang (KF) memiliki nilai mean di kisaran aktual sebesar 18,53 dengan standar deviasi 2,980. Hal ini menunjukkan bahwa kecenderungan *fraud* pengadaan

barang pada penelitian termasuk dalam kategori jarang terjadi. Variabel Keadilan Distributif (KD) memiliki nilai mean di kisaran aktual sebesar 15,43 dengan standar deviasi 1,519. Hal ini menunjukkan bahwa keadilan distributif pada penelitian termasuk dalam kategori adil. Variabel Keadilan Prosedural (KP) memiliki nilai mean di kisaran aktual sebesar 26,44 dengan standar deviasi 2,999. Hal ini menunjukkan bahwa keadilan prosedural termasuk dalam kategori adil. Variabel Penegakan Peraturan (PP) memiliki nilai mean di kisaran aktual sebesar 20,09 dengan standar deviasi 2,177. Hal ini menunjukkan bahwa penegakan peraturan pada penelitian dikategorikan bahwa peraturan telah ditegakkan secara tegas .

Variabel Keefektifan Pengendalian Internal (KPI) memiliki nilai mean di kisaran aktual sebesar 19,91 dengan standar deviasi 1,937. Hal ini menunjukkan bahwa keefektifan pengendalian internal pada penelitian termasuk dalam kategori efektif. Variabel Asimetri Informasi (AI) memiliki nilai mean di kisaran aktual sebesar 20,63 dengan standar deviasi 2,715. Hal ini menunjukkan bahwa asimetri informasi pada penelitian termasuk dalam kategori cukup asimetri. Variabel Budaya Etis Organisasi (BEO) memiliki nilai mean di kisaran aktual sebesar 18,90 dengan standar deviasi 2,382. Hal ini menunjukkan bahwa budaya etis organisasi pada penelitian termasuk dalam kategori etis. Variabel Komitmen Organisasi (KO) memiliki nilai mean di kisaran aktual sebesar 28,44 dengan standar deviasi 2,530. Hal ini menunjukkan bahwa komitmen organisasi pada penelitian dikategorikan bahwa pegawai memiliki komitmen yang tinggi.

Uji Validitas

Tabel 4.4. Hasil Uji Validitas

Variabel	Item	R Hitung	Signifikan	Keterangan
Kecenderungan <i>Fraud</i> Pengadaan Barang	KF1	0,520**	0,2352	Valid
	KF2	0,503**	0,2352	Valid
	KF3	0,491**	0,2352	Valid
	KF4	0,593**	0,2352	Valid
	KF5	0,616**	0,2352	Valid
	KF6	0,626**	0,2352	Valid
	KF7	0,652**	0,2352	Valid
	KF8	0,574**	0,2352	Valid
	KF9	0,547**	0,2352	Valid
Keadilan Distributif	KD1	0,634**	0,2352	Valid
	KD2	0,535**	0,2352	Valid
	KD3	0,686**	0,2352	Valid
	KD4	0,771**	0,2352	Valid
Keadilan Prosedural	KP1	0,687**	0,2352	Valid

	KP2	0,653**	0,2352	Valid
	KP3	0,744**	0,2352	Valid
	KP4	0,641**	0,2352	Valid
	KP5	0,515**	0,2352	Valid
	KP6	0,276*	0,2352	Valid
	KP7	0,732**	0,2352	Valid
	Penegakan Peraturan	PP1	0,626**	0,2352
PP2		0,722**	0,2352	Valid
PP3		0,725**	0,2352	Valid
PP4		0,706**	0,2352	Valid
PP5		0,672**	0,2352	Valid
Keefektifan Pengendalian Internal	KPI1	0,681**	0,2352	Valid
	KPI2	0,635**	0,2352	Valid
	KPI3	0,695**	0,2352	Valid
	KPI4	0,703**	0,2352	Valid
	KPI5	0,523**	0,2352	Valid
Asimetri Informasi	AI1	0,329**	0,2352	Valid
	AI2	0,381**	0,2352	Valid
	AI3	0,598**	0,2352	Valid
	AI4	0,785**	0,2352	Valid
	AI5	0,811**	0,2352	Valid
	AI6	0,763**	0,2352	Valid
Budaya Etis Organisasi	BEO1	0,722**	0,2352	Valid
	BEO2	0,680**	0,2352	Valid
	BEO3	0,605**	0,2352	Valid
	BEO4	0,596**	0,2352	Valid
	BEO5	0,627**	0,2352	Valid
Komitmen Organisasi	KO1	0,427**	0,2352	Valid
	KO2	0,285*	0,2352	Valid
	KO3	0,376**	0,2352	Valid
	KO4	0,581**	0,2352	Valid
	KO5	0,443**	0,2352	Valid
	KO6	0,569**	0,2352	Valid
	KO7	0,579**	0,2352	Valid
	KO8	0,647**	0,2352	Valid

Sumber: Output SPSS *versi 17*

Diolah kembali oleh peneliti

Tabel 4.4 menunjukkan bahwa seluruh butir-butir pertanyaan dinyatakan valid karena memiliki nilai r hitung $>$ nilai r tabel sebesar 0,2352.

Uji Reliabilitas

Tabel 4.5. Hasil Uji Reliabilitas

No.	Variabel	Nilai <i>Cronbach's Alpha</i>	Keterangan
1	Kecenderungan <i>Fraud</i> Pengadaan Barang	0,725	Reliabel
2	Keadilan Distributif	0,528	Reliabel
3	Keadilan Prosedural	0,699	Reliabel
4	Penegakan Peraturan	0,719	Reliabel
5	Keefektifan Pengendalian Internal	0,652	Reliabel
6	Asimetri Informasi	0,708	Reliabel

7	Budaya Etis Organisasi	0,634	Reliabel
8	Komitmen Organisasi	0,549	Reliabel

Sumber: Output SPSS *versi 17*

Diolah kembali oleh peneliti

Tabel 4.5 menunjukkan bahwa variabel yang diuji reliabel. Nilai *cronbach alpha* Keadilan Distributif, Keadilan Prosedural, Keefektifan Pengendalian Internal, Budaya Etis Organisasi dan Komitmen Organisasi sebesar 0,50-0,70 sehingga memiliki reliabilitas moderat. Sedangkan nilai *cronbach alpha* Kecenderungan *Fraud* Pengadaan Barang, Penegakan Peraturan dan Asimetri Informasi sebesar 0,70-0,90 sehingga memiliki reliabilitas tinggi.

Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas Data

Tabel 4.6. Hasil Uji Normalitas Data

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		68
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.43736916
Most Extreme Differences	Absolute	.075
	Positive	.075
	Negative	-.055
Kolmogorov-Smirnov Z		.619
Asymp. Sig. (2-tailed)		.838

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber: Output SPSS *versi 17*

Diolah kembali oleh peneliti

Tabel 4.6 menunjukkan bahwa nilai sig yaitu sebesar $0,838 > 0,05$, karena nilai sig lebih besar dari *alpha* 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal dan dapat dilakukan analisis lebih lanjut.

2. Uji Multikolinearitas

Tabel 4.7. Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	Collinearity Statistics		Keterangan
	Tolerance	VIF	
Keadilan Distributif	0,240	4,169	Tidak terjadi multikolinearitas
Keadilan Prosedural	0,286	3,491	Tidak terjadi multikolinearitas
Penegakan Peraturan	0,228	4,387	Tidak terjadi multikolinearitas

Keefektifan Pengendalian Internal	0,342	2,927	Tidak terjadi multikolinearitas
Asimetri Informasi	0,424	2,356	Tidak terjadi multikolinearitas
Budaya etis Organisasi	0,231	4,335	Tidak terjadi multikolinearitas
Komitmen Organisasi	0,427	2,339	Tidak terjadi multikolinearitas

Sumber: Output SPSS versi 17

Diolah kembali oleh peneliti

Tabel 4.7 menunjukkan bahwa masing-masing variabel independen memiliki nilai VIF < 10, dan nilai *tolerance* > 0,1. Maka dapat disimpulkan seluruh variabel independen tidak mengalami multikolinearitas.

3. Uji Heteroskedastisitas

Tabel 4.8. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variabel	Nilai Sig.	Keterangan
Keadilan Distributif	0,302	Tidak terjadi heteroskedastisitas
Keadilan Prosedural	0,238	Tidak terjadi heteroskedastisitas
Penegakan Peraturan	0,060	Tidak terjadi heteroskedastisitas
Keefektifan Pengendalian Internal	0,486	Tidak terjadi heteroskedastisitas
Asimetri Informasi	0,075	Tidak terjadi heteroskedastisitas
Budaya etis Organisasi	0,609	Tidak terjadi heteroskedastisitas
Komitmen Organisasi	0,986	Tidak terjadi heteroskedastisitas

Sumber: Output SPSS versi 17

Diolah kembali oleh peneliti

Tabel 4.8 menunjukkan bahwa seluruh variabel independen memiliki nilai sig > 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan masing-masing variabel independen tidak terjadi heteroskedastisitas.

Uji Hipotesis dan Analisis Data

Uji Nilai F

Tabel 4.9. Hasil Uji Koefisien Simultan
ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	470.341	7	67.192	29.124	.000 ^a
	Residual	138.424	60	2.307		
	Total	608.765	67			

a. Predictors: (Constant), TOTAL_KO, TOTAL_BEO, TOTAL_KD, TOTAL_AI, TOTAL_KPI, TOTAL_KP, TOTAL_PP

b. Dependent Variable: TOTAL_KF

Sumber: Output SPSS versi 17

Diolah kembali oleh peneliti

Berdasarkan Tabel 4.9 dapat diketahui bahwa nilai sig sebesar $0,000 < 0,05$ artinya keadilan distributif, keadilan prosedural, penegakan peraturan, keefektifan pengendalian internal, asimetri informasi, budaya etis organisasi dan komitmen organisasi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kecenderungan *fraud* pengadaan barang.

Uji Nilai t

Tabel 4.10. Hasil Uji Hipotesis
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	11.523	2.525		4.563	.000
	TOTAL_KD	-.636	.249	-.321	-2.552	.013
	TOTAL_KP	.802	.116	.798	6.939	.000
	TOTAL_PP	.525	.179	.379	2.939	.005
	TOTAL_KPI	.469	.164	.301	2.862	.006
	TOTAL_AI	.504	.105	.454	4.803	.000
	TOTAL_BEO	-.503	.162	-.397	-3.099	.003
	TOTAL_KO	-.290	.112	-.243	-2.586	.012

a. Dependent Variable: TOTAL_KF

Sumber: Output SPSS versi 17

Diolah kembali oleh peneliti

a. Keadilan Distributif (X₁)

Dari uji hipotesis pertama nilai koefisien regresi sebesar -0,636 dengan nilai sig 0,013 < 0,05 yang artinya keadilan distributif berpengaruh negatif terhadap kecenderungan *fraud* pengadaan barang. Maka dapat disimpulkan hipotesis pertama (H₁) **diterima**.

b. Keadilan Prosedural (X₂)

Dari uji hipotesis kedua nilai koefisien regresi sebesar 0,802 dengan nilai sig 0,000 < 0,05 yang artinya keadilan prosedural berpengaruh positif terhadap kecenderungan *fraud* pengadaan barang. Maka dapat disimpulkan hipotesis kedua (H₂) **ditolak**.

c. Penegakan Peraturan (X₃)

Dari uji hipotesis ketiga nilai koefisien regresi sebesar 0,525 dengan nilai sig 0,005 < 0,05 yang artinya penegakan peraturan berpengaruh positif terhadap kecenderungan *fraud* pengadaan barang. Maka dapat disimpulkan hipotesis ketiga (H₃) **ditolak**.

d. Keefektifan Pengendalian Internal (X₄)

Dari uji hipotesis keempat nilai koefisien regresi sebesar 0,469 dengan nilai sig 0,006 < 0,05 yang artinya keefektifan pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kecenderungan *fraud* pengadaan barang. Maka dapat disimpulkan hipotesis keempat (H₄) **ditolak**.

e. Asimetri Informasi (X5)

Dari uji hipotesis kelima nilai koefisien regresi sebesar 0,504 dengan nilai sig $0,000 < 0,05$ yang artinya asimetri informasi berpengaruh positif terhadap kecenderungan *fraud* pengadaan barang. Maka dapat disimpulkan hipotesis kelima (H₅) **diterima**.

f. Budaya Etis Organisasi (X6)

Dari uji hipotesis keenam nilai koefisien regresi sebesar -0,503 dengan nilai sig $0,003 < 0,05$ yang artinya budaya etis organisasi berpengaruh negatif terhadap kecenderungan *fraud* pengadaan barang. Maka dapat disimpulkan hipotesis keenam (H₆) **diterima**.

g. Komitmen Organisasi (X7)

Dari uji hipotesis ketujuh nilai koefisien regresi sebesar -0,290 dengan nilai sig $0,012 < 0,05$ yang artinya komitmen organisasi berpengaruh negatif terhadap kecenderungan *fraud* pengadaan barang. Maka dapat disimpulkan hipotesis ketujuh (H₇) **diterima**.

Uji Koefisien Determinasi (*Adjusted R*²)

**Tabel 4.11. Hasil Uji Koefisien Determinasi
Model Summary^b**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.879 ^a	.773	.746	1.519

a. Predictors: (Constant), TOTAL_KO, TOTAL_BEO, TOTAL_KD, TOTAL_AI, TOTAL_KPI, TOTAL_KP, TOTAL_PP

b. Dependent Variable: TOTAL_KF

Sumber: Output SPSS versi 17
Diolah kembali oleh peneliti

Tabel 4.11 menunjukkan nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,746 yang dapat diartikan bahwa 74,6% variabel kecenderungan *fraud* pengadaan barang dapat dijelaskan oleh variabel keadilan distributif, keadilan prosedural, penegakan peraturan, keefektifan pengendalian internal, asimetri informasi, budaya etis organisasi dan komitmen organisasi. Sedangkan 25,4% sisanya dijelaskan oleh variabel lain yang tidak terdapat pada model penelitian ini.

Pembahasan

1. Pengaruh Keadilan Distributif Terhadap Kecenderungan *Fraud* Pengadaan Barang

Hasil dari uji hipotesis pertama diperoleh nilai sig 0,013 < 0,05 dan nilai koefisien regresi sebesar -0,636. Hal itu menunjukkan keadilan distributif berpengaruh negatif terhadap kecenderungan *fraud* pengadaan barang. Berdasarkan hasil tersebut dapat dibuktikan bahwa keadilan distributif dapat menekan terjadinya *fraud* pengadaan barang. Jadi semakin tinggi keadilan distributif bagi pegawai maka kecenderungan *fraud* pengadaan barang semakin dapat diminimalisasi.

Hasil pengujian ini sejalan dengan penelitian Najahningrum (2013), serta Adinda dan Ikhsan (2015) yang menyatakan bahwa semakin adil keadilan distributif maka akan semakin rendah kecenderungan pegawai untuk melakukan kecurangan. Herman (2013) juga menyimpulkan keadilan dalam organisasi berpengaruh signifikan negatif terhadap kecurangan. Keadilan dalam distribusi imbalan sangat mempengaruhi kesejahteraan pegawai sehingga apabila terdapat keadilan dalam penggajian maka tercapai kesejahteraan pegawai

Dalam pencegahan terjadinya kecenderungan *fraud* pengadaan barang, keadilan distributif menjadi salah satu faktor yang berperan besar. Ketika pegawai merasa bahwa imbalan yang mereka terima sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan pada organisasinya maka pegawai akan merasa cukup dengan hak yang mereka terima. Hak-hak harus diberikan sesuai dengan tingkat kontribusi individual terhadap organisasi agar individu merasa diapresiasi oleh atasan melalui pemberian imbalan-imbalan. Oleh karena itu, tindakan-tindakan kecurangan demi mendapat pendapatan yang tinggi dapat dihindarkan.

2. Pengaruh Keadilan Prosedural Terhadap Kecenderungan *Fraud* Pengadaan Barang

Hasil dari uji hipotesis kedua diperoleh nilai sig 0,000 < 0,05 dan nilai koefisien regresi sebesar 0,802. Hal itu menunjukkan keadilan prosedural berpengaruh positif terhadap kecenderungan *fraud* pengadaan barang. Berdasarkan hasil tersebut dapat dibuktikan bahwa keadilan prosedural tidak dapat menekan terjadinya *fraud* pengadaan barang. Jadi semakin adil prosedur yang ditetapkan tidak akan mempengaruhi atau tidak dapat meminimalisasi kecenderungan *fraud* pengadaan barang.

Hasil pengujian ini bertentangan dengan penelitian Najahningrum (2013), Mustikasari 2013 serta Adinda dan Ikhsan (2015) yang menyatakan keadilan prosedural berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan. Namun sejalan dengan penelitian Rachmanta dan Ikhsan (2014) serta Pristiyanti (2012) yang menyatakan bahwa meskipun keadilan prosedural sudah adil tidak dapat menjamin kecurangan tidak terjadi. Hal ini disebabkan karena ada permasalahan yang muncul dari individu itu sendiri.

Menurut persepsi pegawai yaitu adanya faktor perbedaan kepentingan yang terjadi pada seorang pegawai. Setiap individu menginginkan kepentingannya dapat diakomodasi dengan prosedur, padahal kepentingan-kepentingan tersebut seringkali berbeda satu dengan lainnya dan tidak jarang saling bertentangan. Hal itu menyebabkan individu merasa kepentingan mereka belum diwujudkan dengan adanya prosedur penggajian dan pemberian kompensasi lainnya. Sehingga mereka merasa prosedur/sistem tersebut belum mengekspresikan pandangan dan perasaan sesuai dengan kriteria yang mereka inginkan.

3. Pengaruh Penegakan Peraturan Terhadap Kecenderungan *Fraud* Pengadaan Barang

Hasil dari uji hipotesis ketiga diperoleh nilai sig $0,005 < 0,05$ dan nilai koefisien regresi sebesar 0,525. Hal itu menunjukkan penegakan peraturan berpengaruh positif terhadap kecenderungan *fraud* pengadaan barang. Berdasarkan hasil tersebut dapat dibuktikan bahwa penegakan peraturan tidak dapat mengurangi terjadinya *fraud* pengadaan barang. Meskipun penegakan peraturan sudah ditegakkan, kecenderungan *fraud* tetap saja dapat terjadi.

Hasil pengujian ini bertentangan dengan penelitian Mustikasari (2013), Najahningrum (2013) serta Chandra dan Ikhsan (2015) yang menyatakan bahwa penegakan peraturan berpengaruh negatif terhadap kecenderungan fraud. Namun sejalan dengan penelitian Adinda dan Ikhsan (2015) yang menyatakan bahwa semakin tinggi penegakan peraturan maka tidak juga dapat menekan tingkat kecenderungan kecurangan. Seringkali penegakan peraturan tidak ditegakkan secara tegas dan pemberian sanksi kepada pelaku tidak sebanding dengan beratnya pelanggaran yang dilakukan sehingga menyebabkan oknum pegawai dengan mudah melanggar peraturan yang berlaku tanpa takut akan sanksi yang akan didapatkan. Hal ini dapat diartikan

bahwa manusia ingin sesuatu yang serba instan tanpa melalui proses yang sulit, sehingga mereka akan memiliki *attitude* atau sikap tidak disiplin dimana akan menimbulkan persepsi bahwa wajar apabila sesuatu dicapai meskipun harus melanggar aturan.

4. Pengaruh Keefektifan Pengendalian Internal Terhadap Kecenderungan *Fraud* Pengadaan Barang

Hasil dari uji hipotesis keempat diperoleh nilai sig $0,006 < 0,05$ dan nilai koefisien regresi sebesar 0,469. Hal itu menunjukkan keefektifan pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kecenderungan *fraud* pengadaan barang. Berdasarkan hasil tersebut dapat dibuktikan bahwa keefektifan pengendalian internal tidak dapat menekan terjadinya *fraud* pengadaan barang. Jadi semakin tinggi keefektifan pengendalian internal yang ditetapkan tidak akan mempengaruhi atau tidak dapat meminimalisasi kecenderungan *fraud* pengadaan barang.

Hasil pengujian ini bertentangan dengan penelitian Zainal (2013), Artini, dkk (2014) dan Lestari, dkk (2015) yang menyatakan bahwa efektivitas pengendalian internal berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan. Namun sejalan dengan penelitian Rachmanta dan Ikhsan (2014) yang menyimpulkan bahwa meskipun sistem pengendalian sudah efektif tidak dapat menjamin kecurangan tidak terjadi. Ada 2 faktor yang menyebabkan pegawai tetap melakukan tindak kecurangan meskipun sistem pengendalian internal cukup efektif. Faktor pertama yaitu individu yang memiliki sifat tidak malu melakukan kecurangan. Hasibuan (2002:166) dalam Rachmanta dan Ikhsan (2014) menyatakan bahwa materialitas telah membuat individu berbuat apa saja demi harta tanpa rasa malu. Faktor kedua yaitu lingkungan sekitar yang apatis terhadap pelaku kecurangan sehingga memudahkan pelaku untuk melakukan tindakan kecurangan. Sujarwa (2005:115) dalam Rachmanta dan Ikhsan (2014) menjelaskan bahwa kesadaran moral merupakan hal yang sangat penting untuk diperhatikan setiap orang karena apabila ketidaksadaran ada pada diri seseorang dapat membuat kepincangan dalam hidup.

5. Pengaruh Asimetri Informasi Terhadap Kecenderungan *Fraud* Pengadaan Barang

Hasil dari uji hipotesis kelima diperoleh nilai sig $0,000 < 0,05$ dan nilai koefisien regresi sebesar 0,504. Hal itu menunjukkan asimetri informasi berpengaruh positif

terhadap kecenderungan *fraud* pengadaan barang. Berdasarkan hasil tersebut dapat dijelaskan bahwa asimetri informasi dapat mendorong terjadinya *fraud* pengadaan barang. Artinya, jika tingkat asimetri informasi semakin tinggi maka semakin tinggi juga tingkat kecenderungan *fraud* pengadaan barang.

Hasil pengujian ini sejalan dengan penelitian Mustikasari (2013), Prawira, dkk (2014) dan Virmayani, dkk (2017) yang menyatakan bahwa asimetri informasi berpengaruh positif terhadap kecenderungan *fraud* artinya dengan adanya asimetri informasi yang tinggi akan memperbesar kecenderungan kecurangan. Faktor penyebab terjadinya asimetri informasi pada organisasi adalah adanya ketidakselarasan informasi yang dibutuhkan *principal* dan yang disediakan oleh agen membuat manajemen dapat melakukan tindakan-tindakan yang dapat memberikan keuntungan bagi pribadinya dan menyebabkan kerugian bagi organisasi. Selain itu apabila terjadi asimetri informasi, manajemen akan menyajikan laporan keuangan yang bermanfaat bagi mereka demi memperoleh kompensasi bonus yang tinggi, mempertahankan jabatan dan lain-lain. Namun apabila dalam suatu organisasi diberlakukan transparansi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan operasional organisasi dan berpengaruh terhadap laporan keuangan, maka akan menekan tindakan kecurangan.

6. Pengaruh Budaya Etis Organisasi Terhadap Kecenderungan *Fraud* Pengadaan Barang

Hasil dari uji hipotesis keenam diperoleh nilai sig $0,003 < 0,05$ dan nilai koefisien regresi sebesar $-0,503$. Hal itu menunjukkan budaya etis organisasi berpengaruh negatif terhadap kecenderungan *fraud* pengadaan barang. Berdasarkan hasil tersebut dapat dibuktikan bahwa budaya etis organisasi dapat meminimalisasi terjadinya *fraud* pengadaan barang. Dengan diterapkannya suatu budaya etis dalam organisasi maka akan mendorong seseorang untuk melakukan tindakan-tindakan yang beretika sehingga kecenderungan kecurangan dapat dihindarkan.

Hasil pengujian ini sejalan dengan penelitian Pristiyanti (2012), Lestari, dkk (2015) dan Artini, dkk (2014) yang menyatakan bahwa budaya etis organisasi berpengaruh negatif terhadap kecenderungan *fraud* artinya semakin tinggi budaya etis yang ada di organisasi maka akan semakin rendah tingkat terjadinya *fraud*. Budaya organisasi yang baik tidak akan membuka peluang sedikitpun bagi individu untuk melakukan penyimpangan, karena budaya organisasi yang baik akan membentuk para

pelaku organisasi mempunyai *sense of belonging* (rasa ikut memiliki) dan *sense of identity* (rasa bangga sebagai bagian dari organisasi). Begitu juga sebaliknya, apabila budaya etis organisasi rendah maka akan memiliki resiko kecenderungan kecurangan yang tinggi. Budaya merupakan suatu sistem yang telah menjadi kebiasaan anggota organisasi sejak dulu. Apabila dalam organisasi memiliki budaya yang kurang baik maka akan membentuk perilaku tidak baik juga bagi anggota organisasinya. Hal itu disebabkan karena hal yang menyimpang sudah dianggap wajar dan biasa terjadi.

7. Pengaruh Komitmen Organisasi Terhadap Kecenderungan *Fraud* Pengadaan Barang

Hasil dari uji hipotesis ketujuh diperoleh nilai sig $0,012 < 0,05$ dan nilai koefisien regresi sebesar $-0,290$. Hal itu menunjukkan komitmen organisasi berpengaruh negatif terhadap kecenderungan *fraud* pengadaan barang. Berdasarkan hasil tersebut dapat dibuktikan bahwa komitmen organisasi dapat menekan terjadinya *fraud* pengadaan barang. Artinya, jika semakin tinggi komitmen pegawai terhadap organisasi maka tindakan kecurangan dapat dihindarkan.

Hasil pengujian ini sejalan dengan penelitian Rachmanta dan Ikhsan (2014), Virmayani, dkk (2017) serta Najahningrum (2013) yang menyatakan bahwa komitmen organisasi berpengaruh negatif terhadap kecenderungan *fraud* artinya semakin tinggi komitmen organisasi akan semakin rendah kecenderungan kecurangan yang mungkin terjadi. Komitmen organisasi merupakan tindakan yang berhubungan dengan keyakinan seorang individu terhadap nilai dan tujuan organisasi, keinginan yang tinggi untuk bekerja dan kemauan yang kuat untuk tetap menjadi anggota di organisasi. Komitmen organisasi seorang individu dapat diperlihatkan dengan kerja keras yang gigih meskipun sedang mendapat tekanan. Seseorang yang memiliki komitmen organisasi tinggi dalam dirinya akan berusaha untuk melakukan pekerjaan dengan baik daripada seseorang yang tidak memiliki komitmen.

Kesimpulan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keadilan prosedural, penegakan peraturan, keefektifan pengendalian internal dan asimetri informasi berpengaruh positif terhadap kecenderungan *fraud* pengadaan barang. Sedangkan keadilan distributif,

budaya etis organisasi dan komitmen organisasi berpengaruh negatif terhadap kecenderungan *fraud* pengadaan barang.

Keterbatasan Penelitian

Sampel penelitian terbatas karena tidak dilakukan di seluruh rumah sakit berstatus paripurna di Daerah Istimewa Yogyakarta karena adanya prosedur perijinan penelitian yang sulit di beberapa rumah sakit seperti MoU dan *critical clearance*, serta adanya keterbatasan waktu, tenaga dan biaya. Kemudian penelitian hanya menggunakan kuesioner dalam pengumpulan data tanpa ada wawancara.

Saran

1. Bagi peneliti yang ingin mengadakan penelitian mengenai kecenderungan *fraud* pengadaan barang di rumah sakit yang besar dapat menambah sampel di luar Daerah Istimewa Yogyakarta seperti beberapa kota besar di Jawa Tengah yaitu Semarang, Solo, Surakarta dan lain-lain karena pegawai bagian pengadaan barang yang bekerja di rumah sakit jumlahnya tidak terlalu banyak sehingga membutuhkan objek rumah sakit yang lebih banyak lagi.
2. Bagi penelitian selanjutnya, diharapkan melakukan studi pendahuluan terlebih dahulu sebelum melanjutkan penelitian dengan cara survei tentang beberapa prosedur perijinan dan jumlah pegawai yang berkaitan dengan kegiatan pengadaan barang di rumah sakit yang menjadi sasaran objek penelitian. Hal ini sangat berguna untuk mengetahui jumlah rumah sakit yang memiliki prosedur perijinan yang mudah dan untuk mengetahui jumlah responden yang akan disebar kuesioner.
3. Bagi penelitian selanjutnya, selain melakukan pengisian kuesioner sebaiknya juga melakukan wawancara secara langsung terhadap responden pada saat penyebaran kuesioner, sehingga pengisian kuesioner akan lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Adinda, Y. M., dan Ikhsan, S. (2015). Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Kecurangan (Fraud) di Sektor Pemerintahan Kabupaten Klaten. *Accounting Analysis Journal*, Vol. 4(3), h. 1–9.
- Afsari, Siti Fitriani. (2016). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kecenderungan Kecurangan (Fraud) di Sektor Pemerintahan Berdasarkan Teori *Fraud Triangle*: Persepsi Pegawai Pemerintahan. *Skripsi Digital Repository Universitas Universitas Jember*.
- Aranta, P. Z. (2013). Pengaruh Moralitas Aparat dan Asimetri Informasi Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi. *Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang*.
- Arfah, E. A. (2011). Pencegahan Fraud Pengadaan Barang dan Implikasinya pada Kinerja Keuangan (Studi pada Rumah Sakit Pemerintah dan Swasta di Kota Bandung). *Jurnal Investasi*, Vol. 7(2), h. 137–153.
- Arifianti, R., dan Santoso, B. (2015). Perspektif Triangle Fraud Theory dalam Pengadaan Barang Jasa di Pemerintah Provinsi NTB. *Infestasi*, Vol. 11(2), h. 195–213.
- Artini, N. Luh Eka Ari, Adiputra, I Made Pradana, dan Herawati, Nyoman Trisna. (2014). Pengendalian Internal terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi pada Satuan Kerja Perangkat. *E-Journal SI Ak Universitas Pendidikan Ganesha*, Vol. 2(1).
- Chandra, D. P., dan Ikhsan, S. (2015). Determinan Terjadinya Kecenderungan Kecurangan Akuntansi (Fraud) pada Dinas Pemerintah Se Kabupaten Grobogan. *Accounting Analysis Journal*, Vol. 4(3), h. 1–9.
- Herman, L. A. (2013). Pengaruh Keadilan Organisasi dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kecurangan. *Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang*.
- Hermiyetti. (2010). Pengaruh Penerapan Pengendalian Internal terhadap Pencegahan Fraud Pengadaan Barang. *Stekpi Jakarta*, Vol. 13(4), h. 29–39.
- Jatiningtyas, N. (2011). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Fraud Pengadaan Barang/Jasa Pada Lingkungan Instansi Pemerintah di Wilayah Semarang. *Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro*.
- Kurniawati, E. (2012). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Financial Statement Fraud dalam Perspektif Fraud Triangle. *Skripsi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro*.
- Lestari, K. A., Purnamawati, I. Gusti Ayu, dan Herawati, Nyoman Trisna. (2015). Pengaruh Pengendalian Internal dan Budaya Etis Organisasi terhadap Kecenderungan Kecurangan (Fraud) pada Koperasi Simpan Pinjam. *E-journal SI Ak Universitas Pendidikan Ganesha*, Vol. 3(1).
- Mustikasari, D. P. (2013). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Fraud di Sektor

- Pemerintah Kabupaten Batang. *Accounting Analysis Journal*, Vol. 2(3), h. 1–6.
- Najahningrum, Anik Fatun. (2013). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kecenderungan Kecurangan (Fraud) : Persepsi Pegawai Dinas Provinsi DIY. *Accounting Analysis Journal*, Vol. 2(3), h. 259-267.
- Prawira, I. M. D., Herawati, N. T., dan Darmawan, N. A. S. (2014). Pengaruh Moralitas Individu, Asimetri Informasi dan Efektivitas Pengendalian Internal Terhadap Kecenderungan Kecurangan (Fraud) Akuntansi. *E-Journal SI Ak Universitas Pendidikan Ganesha*, Vol. 2(1).
- Pristiyanti, I. Ruly. (2012). Persepsi Pegawai Instansi Pemerintah Mengenai Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Fraud di Sektor Pemerintah. *Accounting Analysis Journal*, Vol. 3(1), h. 361–369.
- Puspasari, N., dan Suwardi, E. Pengaruh Moralitas Individu dan Pengendalian Internal Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi. *Universitas Gadjah Mada*, h. 1–30.
- Rachmanta, R., dan Ikhsan, S. (2014). Analisis Fakor-Faktor yang Mempengaruhi Kecurangan (Fraud) di Sektor Pendidikan Kota Semarang. *Accounting Analysis Journal*, Vol. 3(1), h. 361–369.
- Saidina, D. A., Nurhidayati, H., dan Mawardi, M. C. (2016). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perilaku Kecurangan Akademik dalam Perspektif Fraud Triangle pada Mahasiswa Akuntansi Universitas Islam Malang. *Universitas Islam Malang*, h. 1–14.
- Sukirman, dan Sari, M. P. (2013). Model Deteksi Kecurangan Berbasis Fraud Triangle. *Jurnal Akuntansi dan Auditing*, Vol. 9(2), h. 199–225.
- Virmayani, C., Sulindawati, Ni Luh Gede Erni, dan Atmadja, Anantawikrama Tungga. (2017). Budaya Etis Organisasi dan Komitmen Organisasi terhadap Kecenderungan Kecurangan (Fraud) Akuntansi pada Koperasi Simpan Pinjam Se-Kecamatan Buleleng. *E-Journal SI Ak Universitas Pendidikan Ganesha*, Vol. 7(1).
- Zainal, R. (2013). Pengaruh Efektivitas Pengendalian Intern, Asimetri Informasi dan Kesesuaian Kompensasi terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi (Fraud). *Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang*.
- Zulkarnain, R. M. (2013). Analisis Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Fraud pada Dinas Kota Surakarta. *Accounting Analysis Journal*, Vol. 2(2), h. 1–4.